

## Peran Administrasi Publik Dan Komunikasi Publik Dalam Membangun Kolaborasi Antara Kelompok Masyarakat (Pokmas Mulya Abadi) Dan Pemerintah Guna Pembangunan Kelurahan

**Ulva Roifatul Lailin**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Balitar  
Email: [doramexminorii@gmail.com](mailto:doramexminorii@gmail.com)

**Nik Haryanti**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Balitar  
Email: [nikharyanti1983@gmail.com](mailto:nikharyanti1983@gmail.com)

**Rio Septyan Ardiansyah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Balitar  
Email: [rferdinand859@gmail.com](mailto:rferdinand859@gmail.com)

**Abstract.** *Village development is an important part of efforts to improve the quality of life of urban communities. This research examines the role of public administration and public communication in building collaboration between community groups and the government in sub-district development. This research is very important because the success of sub-district development is very dependent on collaborative relationships between the government and community groups. The aim is not only to find things that influence this cooperation, but also to show useful methods for increasing community participation in sub-district development. This research uses a qualitative approach that collects data through participant observation, document analysis, and in-depth interviews. This research includes searching for data information through relevant officials or a team of facilitators on community empowerment activities in physical and non-physical work, examining policies and regulations related to community empowerment, and direct observation of Mulya Abadi Pokmas activities in Bendogerit Village, Blitar City. Next, the data was analyzed using a thematic approach to find patterns and themes in public communication, public administration, and collaboration between society and government. It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of the dynamics of collaboration in village development between government groups and communities. Intended outcomes also include policy suggestions for increasing the effectiveness of collaboration, practical guidance for building strong relationships between government and community groups, and theoretical contributions to improve our understanding of public administration and public communication.*

**Keywords:** *Public Administration, Public Communication, Community Groups, Village Development*

**Abstrak.** Pembangunan kelurahan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Penelitian ini meneliti peran administrasi publik dan komunikasi publik dalam membangun kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan. Penelitian ini sangat penting karena keberhasilan pembangunan kelurahan sangat bergantung pada hubungan kolaboratif antara pemerintah dan kelompok masyarakat. Tujuannya tidak hanya untuk menemukan hal-hal yang mempengaruhi kerja sama ini, tetapi juga untuk menunjukkan metode yang berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengumpulkan data melalui observasi partisipatif, analisis dokumen, dan wawancara mendalam. Penelitian ini mencakup pencarian informasi data melalui pejabat terkait ataupun tim fasilitator pada kegiatan pemberdayaan masyarakat pada pekerjaan fisik maupun nonfisik, pemeriksaan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dan pengamatan langsung kegiatan Pokmas Mulya Abadi di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk menemukan pola dan tema dalam komunikasi publik, administrasi publik, dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kolaborasi dalam pembangunan kelurahan antara kelompok dan masyarakat pemerintah. Luaran yang dimaksudkan juga mencakup saran-saran kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, panduan praktis untuk membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan kelompok masyarakat, dan kontribusi teoritis untuk meningkatkan pemahaman kita tentang administrasi publik dan komunikasi publik.

**Kata Kunci :** Administrasi Publik, Komunikasi Publik, Kelompok Masyarakat, Pembangunan Kelurahan

Received: April 25, 2024; Accepted: Mei 30, 2024; Published: Juli 31, 2024

\*Ulva Roifatul Lailin, [doramexminorii@gmail.com](mailto:doramexminorii@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota, pembangunan kelurahan sangatlah penting salah satunya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan kelurahan tidak semata-mata merupakan tugas pemerintah; itu membutuhkan partisipasi aktif dari banyak orang, termasuk kelompok masyarakat setempat. Keberhasilan pembangunan kelurahan yang berkelanjutan dan inklusif bergantung pada kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah. Peran administrasi publik dan komunikasi publik menjadi sangat penting dalam konteks kolaborasi pemerintah-kelompok masyarakat. Administrasi publik mengelola sumber daya dan menetapkan kebijakan yang mendukung pembangunan kelurahan, sementara komunikasi publik membantu berbagai pihak terkait berinteraksi dan menyebarkan informasi. Peran komunikasi publik dan administrasi publik dalam membangun kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Di tengah dinamika ini, komponen peran komunikasi publik dan administrasi publik menjadi penting yang menentukan seberapa efektif kerja sama tersebut. Untuk pembangunan daerah, administrasi publik dan komunikasi publik sangat penting untuk membangun sinergi antara pemerintah dan kelompok masyarakat (Pokmas).

Pemerintah dalam hal ini yaitu Kelurahan Bendogerit dan Pokmas Mulya Abadi bekerja sama di Kelurahan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Komunikasi publik bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dan aspirasi dari berbagai pihak secara efektif, sementara administrasi publik bertanggung jawab untuk mengatur, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal pembangunan kelurahan, partisipasi masyarakat yang aktif sangat penting untuk keberhasilan. Pokmas (Kelompok Masyarakat) Mulya Abadi bertindak sebagai perwakilan warga untuk menyuarakan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sedangkan pemerintah membantu dan menyediakan sumber daya. Pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan sosial dapat dipercepat melalui kerja sama yang efektif ini.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Blitar mencanangkan Program RT Keren. RT adalah kepanjangan dari Rukun Tetangga. RT Keren yang berarti Rukun Tetangga (Keberagaman, Religius dan Nasionalis). Program RT Keren merupakan upaya untuk menstabilkan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sesuai dengan juklak dan juknisnya, bantuan fisik sebesar 70% dan sebesar 30% pembangunan untuk nonfisik. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan pemerintahan

di tingkat RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No.40 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Program RT Keren dan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren dengan maksud Rukun Tetangga (Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) adalah RT. Upaya untuk menstabilkan perekonomian masyarakat setelah pandemi Covid-19 dilakukan melalui Program RT Keren.

Menurut juklak dan juknisnya, bantuan kegiatan fisik sebesar tujuh puluh persen (70%) untuk pembangunan dan sebesar tiga puluh persen untuk kegiatan non-fisik (pelatihan atau penyuluhan). Selain itu, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan pemerintahan di tingkat RT (Rukun Tetangga). Pembangunan kelurahan adalah komponen penting dari pembangunan kota yang berkelanjutan. Dalam situasi seperti ini, administrasi publik dan komunikasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kolaborasi yang efektif antara kelompok masyarakat dan pemerintah. Kolaborasi yang baik antara keduanya dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dibuat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta memastikan bahwa seluruh stakeholder terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Dengan memahami dinamika kelompok masyarakat dan pemerintah, ini sangat penting.

### **Tanggung Jawab Administrasi Publik dalam Pembangunan Kelurahan**

Kebijakan dan program pembangunan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh administrasi publik. Administrasi publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya publik dialokasikan dengan efektif dan efisien serta bahwa kebijakan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan semua orang secara inklusif dalam proses pembangunan kelurahan. Studi sebelumnya (seperti Prasojo, 2015; Nurhayati, 2018) telah menekankan betapa pentingnya administrasi publik yang responsif dan adaptif untuk menangani perubahan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Mengelola sumber daya publik dan menyediakan layanan masyarakat yang efektif dan efisien adalah tugas yang sangat penting bagi administrasi publik. Administrasi publik memiliki peran penting dalam mengalokasikan anggaran, membuat kebijakan, dan mengatur berbagai program pembangunan dalam hal pembangunan kelurahan. Pentingnya administrasi publik yang adaptif untuk menanggapi perubahan di tingkat lokal dalam hal sosial, ekonomi, dan politik. Ini memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan kelurahan sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

## **Komunikasi Publik dalam Membangun Kolaborasi Kelurahan**

Komunikasi publik sangat penting untuk membangun kerja sama yang kuat antara pemerintah dan kelompok masyarakat. Berkomunikasi dengan baik memungkinkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan kelurahan untuk saling memahami, percaya satu sama lain, dan memahami satu sama lain. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi publik yang transparan, inklusif, dan partisipatif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan dan meningkatkan kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah.

Penelitian terdahulu (Putra & Susanto, 2019; Wulandari, 2020) menunjukkan bahwa komunikasi publik yang transparan, inklusif, dan partisipatif mampu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan, serta memperkuat kemitraan antara kelompok masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan: Untuk pembangunan kelurahan yang berkelanjutan, masyarakat setempat harus terlibat secara aktif dalam prosesnya. Nurhayati (2018) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan dapat meningkatkan keberlanjutan dan adopsi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, administrasi publik harus mempertimbangkan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan kelurahan. Pemerintah dan masyarakat dapat saling memahami, mempercayai, dan memahami satu sama lain melalui komunikasi publik. Putra & Susanto (2019) menemukan bahwa komunikasi publik yang terbuka dan terlibat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kerja sama dalam pembangunan kelurahan. Oleh karena itu, administrasi publik harus mempertimbangkan metode komunikasi yang efektif agar berbagai pihak terkait dapat berbicara satu sama lain.

## **Kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pembangunan kelurahan**

Keberhasilan dalam pembangunan kelurahan yang berkelanjutan bergantung pada kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan kelompok masyarakat. Untuk mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks, berbagai sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan dari berbagai pihak dapat digabungkan melalui kerja sama yang efektif. Studi sebelumnya (seperti Anwar & Azizah, 2017; Kusumadewi & Priansa, 2020) telah menekankan bahwa membangun hubungan kemitraan yang berkelanjutan antara kelompok masyarakat dan pemerintah sangat penting. Mereka juga menekankan bahwa kedua belah pihak harus lebih baik dalam bekerja sama. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan:

Menciptakan pembangunan kelurahan yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan partisipasi masyarakat. Wulandari (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mencakup lebih dari hanya konsumsi layanan. Ini mencakup proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam pembangunan kelurahan, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan. Menurut Anwar dan Azizah (2017), kemitraan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat bergantung pada transparansi dalam penyediaan informasi publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, administrasi publik harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan transparan dan memastikan bahwa pertanggungjawaban publik dilaksanakan dengan baik.

Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan: Untuk pembangunan kelurahan yang berkelanjutan, masyarakat harus diberi kekuatan untuk menjadi aktor utama dalam pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Kusumadewi & Priansa (2020) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan; itu juga meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan mandiri dalam mengatasi tantangan pembangunan. Dengan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan kelurahan, pemerintah dapat memperluas basis partisipasi mereka.

Kolaborasi sebagai Landasan Pembangunan Kelurahan yang Berkelanjutan: Pembangunan kelurahan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Adanya pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan solusi inovatif untuk masalah pembangunan dapat dicapai melalui kerja sama yang kuat antara kedua belah pihak. Prasojo (2015) menyatakan bahwa kerja sama yang efektif membutuhkan komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak, serta keinginan untuk membagi risiko dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.

Kesetaraan dalam Hubungan Antara Pemerintah dan Masyarakat: Untuk membangun kelurahan yang inklusif dan berkelanjutan, perlu ada kesetaraan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Nurhayati (2018) menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi pemerintah-masyarakat ditentukan oleh penghargaan dan pengakuan terhadap kepentingan dan kemampuan masing-masing pihak. Pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan memenuhi kebutuhan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat dengan mendorong kesetaraan dalam hubungan.

Pengelolaan Konflik dalam Pembangunan Kelurahan: Konflik adalah bagian penting dari proses pembangunan kelurahan yang dinamis. Untuk menjamin kolaborasi yang lancar antara pemerintah dan masyarakat, pengelolaan konflik secara konstruktif sangat penting, menurut Putra dan Susanto (2019). Pemerintah dapat mencegah konflik menjadi hambatan bagi kemajuan kelurahan dengan memahami sumber konflik dan menggunakan metode mediasi dan konsensus untuk menyelesaikannya. Keberlanjutan Pembangunan sebagai Fokus Utama: Saat merancang kebijakan dan program pembangunan kelurahan, keberlanjutan pembangunan menjadi prioritas utama. Kusumadewi & Priansa (2020) menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan menyeluruh yang memasukkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, dari perencanaan hingga evaluasi, administrasi publik harus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam setiap tahap siklus kebijakan pembangunan.

Dengan melihat kerangka tinjauan pustaka di atas, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran administrasi publik dan komunikasi publik dapat memengaruhi dinamika kolaborasi antara Kelompok Masyarakat Mulya Abadi dan pemerintah dalam konteks pembangunan kelurahan di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar.

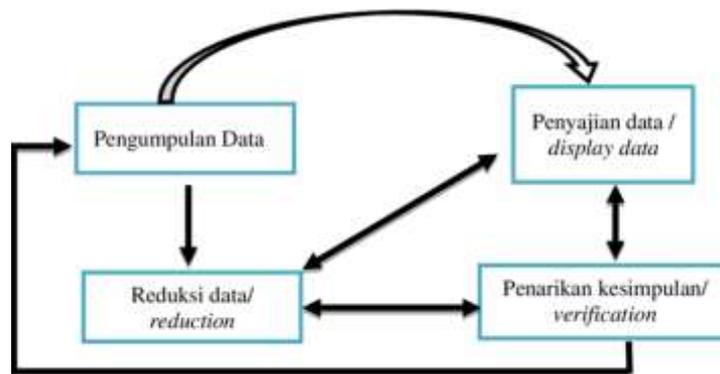
## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumen. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara komunikasi publik, administrasi publik, dan kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan.

- 1) Wawancara Mendalam: Anggota Pokmas Mulya Abadi dan pejabat pemerintah terkait, seperti kepala kelurahan, pegawai administrasi kelurahan, dan pejabat yang berhubungan dengan program pembangunan kelurahan atau tim fasilitator, diwawancarai secara menyeluruh. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif, persepsi, dan pengalaman mereka mengenai kerja sama antara kelompok dan masyarakat pemerintah dalam pembangunan kelurahan. Teori Grounded, yang menekankan proses pengumpulan data dan pengembangan teori dari data itu sendiri, berfungsi sebagai teori pendukung dari metode wawancara mendalam.
- 2) Observasi Partisipatif: Pokmas Mulya Abadi melaksanakan kegiatan di Kelurahan Bendogerit secara langsung. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik

tentang tindakan kelompok masyarakat untuk pemberdayaan fisik dan nonfisik di kelurahan tersebut melalui observasi ini. Teori penelitian etnografi mendukung observasi partisipatif, yang menekankan pemahaman mendalam tentang budaya dan praktik sosial suatu kelompok.

- 3) Analisis Dokumen: Analisis dokumen yang mencakup laporan kegiatan Pokmas Mulya Abadi, kebijakan pembangunan kelurahan, dan program pemberdayaan masyarakat pemerintah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang konteks kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi kerja sama antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan. Teori Content Analysis mendukung analisis dokumen, yang berpusat pada analisis isi dokumen untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah.



Gambar Diagram Alir Penelitian

Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk mempelajari dinamika komunikasi publik, administrasi publik, dan kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memecahkan masalah. Ini dipilih karena metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan antara komunikasi publik, administrasi publik, dan kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam konteks pembangunan kelurahan. Wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah dan anggota kelompok masyarakat, observasi partisipatif dalam kegiatan kelompok masyarakat, dan analisis dokumen kebijakan dan peraturan pembangunan kelurahan adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Peneliti dapat memperoleh perspektif yang beragam dan mendalam dari berbagai orang yang berpartisipasi dalam proses kerja sama melalui wawancara mendalam. Peneliti dapat melihat dan memahami praktik-praktik yang terjadi dalam hubungan antara kelompok masyarakat dan pemerintah secara langsung melalui observasi partisipatif. Di sisi lain, analisis dokumen membantu memahami konteks kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi proses kolaborasi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang luas

tentang komponen yang mempengaruhi kerja sama antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan dengan menggunakan metodologi kualitatif yang beragam ini untuk pengumpulan data. Penelitian ini akan dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat membantu pengembangan kerja sama antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan. Alir penelitian untuk judul ini disusun sebagai berikut:

1) **Persiapan Penelitian:**

Menentukan tujuan penelitian. Menentukan kerangka konseptual, serta teori-teori yang mendukungnya. Membentuk pertanyaan penelitian.

2) **Pengumpulan Data:**

Melakukan observasi partisipatif terhadap kegiatan Pokmas Mulya Abadi; Wawancara dengan pejabat pemerintah terkait di Kelurahan Bendogerit; dan wawancara dengan anggota Pokmas Mulya Abadi. Analisis dokumen yang berkaitan dengan program pemerintah dan kebijakan pembangunan kelurahan.

3) **Analisis Data Informasi:**

Analisis data wawancara untuk menemukan pola dan tema utama; analisis data observasi untuk memahami operasi Pokmas Mulya Abadi; dan analisis dokumen untuk memahami peraturan dan kebijakan yang mempengaruhi kerja sama antara kelompok masyarakat dan pemerintah.

4) **Hasil yang diharapkan sebagai berikut:**

Membuat kesimpulan utama dari analisis data dan menginterpretasikan hasil penelitian menggunakan teori yang mendukung.

5) **Laporan Penelitian:**

membuat laporan penelitian yang mencakup pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Kemudian membuat saran berdasarkan hasil. menyampaikan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti pemerintah daerah, Pokmas Mulya Abadi, dan masyarakat setempat. membuat presentasi yang menunjukkan hasil dan saran penelitian.

6) **Evaluasi dan Penyebaran:**

Evaluasi proses penelitian dan hasil. mendokumentasikan tentang temuan tersebut melalui jurnal, seminar, atau konferensi ilmiah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman dan pengembangan praktik pembangunan kelurahan yang lebih baik di Indonesia dengan mendasarkan metode penelitian pada teori-teori berikut:

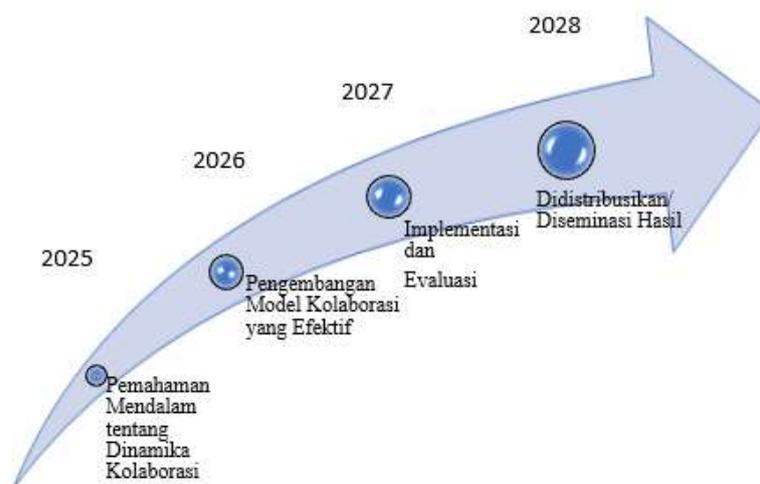
- 1) Teori Partisipasi Pembangunan Lokal: Teori ini menekankan betapa pentingnya masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan lokal. Dr. Ryaas Rasyid (2015) membangun teori yang relevan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip partisipasi pembangunan lokal ini sesuai dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data seperti observasi partisipatif dan wawancara mendalam.
- 2) Teori Komunikasi Pembangunan Lokal: Dalam konteks pembangunan lokal, komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Dr. Hana Panggabean (2018), seorang pakar komunikasi pembangunan di Indonesia, telah membuat teori dan teknik praktis untuk meningkatkan komunikasi dalam upaya pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Metode penelitian termasuk wawancara dan analisis dokumen sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi pembangunan yang dipromosikan oleh teori ini.
- 3) Teori Tata Kelola Lokal: Teori ini menekankan pentingnya tata kelola lokal yang baik untuk memajukan pembangunan yang efektif dan inklusif. Ahli tata kelola lokal Indonesia, Prof. Bintoro Tjokroamidjojo (2010), telah membuat teori dan kerangka konseptual untuk meningkatkan tata kelola lokal yang efektif. Penggunaan analisis dokumen untuk memahami konteks kebijakan dan regulasi pembangunan kelurahan sesuai dengan prinsip tata kelola lokal yang baik dalam konteks penelitian ini

Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang luas tentang komponen yang mempengaruhi kerja sama antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan dengan menggunakan metodologi kualitatif dan berbagai teknik pengumpulan data ini. Banyak penelitian telah melihat bagaimana komunikasi publik dan administrasi publik berperan dalam pembangunan. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mempelajari kedua aspek ini dalam konteks kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan, khususnya di Indonesia. Beberapa penelitian telah menyelidiki peran masing-masing elemen tersebut secara terpisah, namun sangat sedikit penelitian yang secara khusus menyelidiki bagaimana administrasi publik dan komunikasi publik memfasilitasi dan memperkuat kolaborasi semacam itu di tingkat lokal, seperti di tingkat kelurahan. Penelitian ini baru karena fokusnya yang sangat khusus pada peran komunikasi publik dan administrasi publik dalam membangun kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam konteks pembangunan kelurahan di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan yang ada dan memberikan

wawasan baru yang berharga untuk mengembangkan kebijakan dan praktik pembangunan kelurahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Studi ini akan berfungsi sebagai landasan bagi perubahan kebijakan dan praktik pembangunan kelurahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Diperkirakan selama lima tahun ke depan, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja kolaborasi dan melakukan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan masyarakat dan pemerintah setempat. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai landasan yang kokoh untuk membangun praktik dan kebijakan pembangunan kelurahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa langkah penting yang diharapkan dapat dicapai dalam lima tahun mendatang:



- a) Pemahaman Mendalam tentang Dinamika Kolaborasi: Selama dua tahun pertama, penelitian ini akan berkonsentrasi pada mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kolaborasi yang terjadi dalam pembangunan kelurahan antara kelompok masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini akan membantu menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kerja sama.
- b) Pengembangan Model Kolaborasi yang Efektif: Selanjutnya, penelitian ini akan mengarah pada model kolaborasi pengembangan yang efektif antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan pada tahun ketiga hingga keempat. Penelitian sebelumnya di bidang ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan praktik terbaik dari penelitian akan dipertimbangkan dalam model ini.
- c) Implementasi dan Evaluasi: Tahap implementasi model kolaborasi akan dimulai pada tahun kelima. Implementasi ini akan membutuhkan kerja sama yang aktif antara kelompok masyarakat, pemerintah setempat, dan peneliti. Selain itu, evaluasi rutin akan dilakukan untuk menyoroti seberapa efektif implementasi tersebut dalam mencapai tujuan pembangunan kelurahan yang inklusif dan berkelanjutan.

- d) Didistribusikan/ Diseminasi Hasil: Selama seluruh periode penelitian, penyebaran hasil akan menjadi titik perhatian utama. Penelitian ini akan didistribusikan melalui berbagai sarana, seperti publikasi ilmiah, seminar, workshop, dan diskusi dengan orang-orang yang berhubungan dengan masalah tersebut. Penelitian ini harus dapat diakses dan digunakan oleh banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah, kelompok masyarakat, akademisi, dan praktisi pembangunan.

Diharapkan melalui proses-proses ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan masyarakat dan pemerintah daerah, membantu memperbaiki kelurahan.

## **HASIL PENELITIAN**

Dalam pembangunan Kelurahan, administrasi publik dan komunikasi publik sangat penting untuk membangun kolaborasi yang efektif antara Pokmas Mulya Abadi dan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran komunikasi publik dan administrasi publik membantu Pokmas Mulya Abadi dan pemerintah bekerja sama dalam pembangunan Kelurahan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota Pokmas dan perwakilan pemerintah Kelurahan serta melihat kegiatan kolaboratif yang berlangsung. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini:

### **1. Deskripsi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Mulya Abadi di Kelurahan Bendogerit:**

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, dan berfokus pada kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Mulya Abadi untuk pemberdayaan masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik. Grup ini memiliki 7 anggota yang aktif dan terlibat dalam berbagai proyek pembangunan kelurahan, seperti peningkatan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Studi ini dimulai dengan survei lapangan yang melibatkan anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) Mulya Abadi yang aktif berada di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. Informasi tentang latar belakang anggota, tujuan dan aktivitas kelompok, serta kontribusi mereka untuk pembangunan kelurahan adalah bagian dari data yang dikumpulkan. Studi ini menggunakan observasi langsung dan wawancara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, dan program-program Pokmas Mulya Abadi. adapun kepengurusan SK dari Kelompok Masyarakat terlampir dalam lampiran. Pokmas Mulya Abadi adalah kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan kelurahan Bendogerit. Pokmas Mulya Abadi memiliki potensi besar untuk memengaruhi pembangunan kelurahan melalui keterlibatan dan partisipasi dalam berbagai

kegiatan pembangunan. Survei dan wawancara dapat dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang struktur organisasi, tujuan, dan kegiatan Pokmas Mulya Abadi. Informasi ini penting untuk memahami peran dan kontribusi kelompok masyarakat dalam pembangunan kelurahan.

## 2. Mengidentifikasi Peran Administrasi Publik dalam Pembangunan Kelurahan

Setelah mendapatkan data kelompok masyarakat, fokus penelitian beralih ke menemukan bagaimana administrasi publik membantu membangun kelurahan. Ini mencakup pemeriksaan kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kelurahan, serta hubungan antara pemerintah dan Pokmas Mulya Abadi. Data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumen resmi, dan wawancara dengan pejabat pemerintah digunakan untuk menilai responsivitas administrasi publik terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat serta seberapa efektif mereka mengatur berbagai program pembangunan. Peran penting administrasi publik dalam pembangunan kelurahan, termasuk pengalokasian sumber daya, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan. Memahami peran administrasi publik juga dapat menentukan seberapa efektif kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, evaluasi peran administrasi publik dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan kelurahan.

## 3. Hasil dari survei dan wawancara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi publik memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan kelurahan. Hasil ini ditemukan melalui pelaksanaan survei dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan kelurahan seringkali tergantung pada responsivitas dan efektivitas administrasi publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi publik juga bertanggung jawab atas alokasi sumber daya, perencanaan dan implementasi program pembangunan, serta koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik sangat penting untuk membangun kerja sama antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan. Adanya saling pengertian, kepercayaan, dan kerja sama antara berbagai pihak terkait dapat dicapai melalui komunikasi publik yang transparan, terbuka, dan inklusif. Data menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang menerima informasi dengan baik cenderung berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan lebih aktif. Komunikasi publik memainkan peran penting dalam membangun kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemerintah. Dengan memahami seberapa efektif komunikasi publik, kita dapat menilai seberapa baik saling

pengertian, kepercayaan, dan kerja sama yang terjaga antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan kelurahan. Analisis komunikasi publik juga dapat memberikan wawasan tentang strategi dan teknik komunikasi yang efektif dalam memperkuat kolaborasi antara kelompok masyarakat dan pemegang kepentingan pemerintah. Pembangunan kelurahan bergantung pada kerja sama antara Pokmas Mulya Abadi dan pemerintah kelurahan. Dengan melihat kerja sama ini, kita dapat memahami manfaat yang dihasilkan dari pembangunan kelurahan, yang mencakup layanan publik yang lebih baik, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, analisis kolaborasi ini dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang mendukung dan menghambat kolaborasi. Mereka juga dapat menawarkan metode untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas kolaborasi di masa mendatang.

#### 4. Evaluasi Kolaborasi Antara Pokmas Mulya Abadi dan Pemerintah Kelurahan

Evaluasi Kolaborasi Antara Pokmas Mulya Abadi dan Pemerintah Kelurahan: Penelitian ini menganalisis data dari survei, wawancara, dan dokumentasi untuk menilai kolaborasi nyata antara Pokmas Mulya Abadi dan pemerintah kelurahan dalam pembangunan kelurahan. Ini mencakup evaluasi berbagai proyek pembangunan yang telah dikerjakan bersama, tingkat keterlibatan anggota Pokmas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, dan bagaimana kerja sama ini berdampak pada kesehatan masyarakat setempat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kerja sama antara Pokmas Mulya Abadi dan pemerintah kelurahan telah berdampak positif pada pembangunan kelurahan. Pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan program pemberdayaan masyarakat adalah beberapa contoh kerja sama ini. Analisis data menunjukkan bahwa kerja sama yang efektif memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, layanan publik yang lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Evaluasi Efektivitas Komunikasi Publik dalam Membangun Kolaborasi: Pada tahap ini, penelitian berkonsentrasi pada evaluasi seberapa efektif komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat, khususnya Pokmas Mulya Abadi. Sebuah survei dilakukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat melihat informasi yang diberikan pemerintah dan sebaliknya. Dilakukan wawancara menyeluruh dengan anggota Pokmas dan pejabat pemerintah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses komunikasi yang terjadi, serta kendala dan masalah yang dihadapi.

#### 5. Capaian Luaran:

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan, terutama melalui kegiatan Pokmas Mulya Abadi; peningkatan kualitas komunikasi publik antara pemerintah dan

masyarakat, yang meningkatkan pemahaman dan kepercayaan satu sama lain; dan pembentukan kemitraan yang kuat antara Pokmas Mulya Abadi dan pemerintah kelurahan, yang memungkinkan kerja sama yang berkelanjutan dalam pembangunan kelurahan. Hasil penelitian mencakup berbagai kemajuan yang ditunjukkan oleh data dan analisis yang dilakukan. Ini mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan, peningkatan kualitas komunikasi publik, dan pembentukan kemitraan yang kuat antara Pokmas Mulya Abadi dan pemerintah kelurahan. Capaian ini dapat dilihat melalui jumlah proyek yang berhasil diselesaikan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, dan indikator lainnya yang relevan.

Untuk meningkatkan kolaborasi, beberapa strategi telah diidentifikasi yaitu antara lain:

- a. Penguatan Komunikasi: Untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi terbaru, pemerintah dan Pokmas harus berkomunikasi lebih sering dan lebih baik.
- b. Pelatihan dan Kapasitas: Memberikan pelatihan kepada anggota Pokmas dan staf pemerintah untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- c. Sederhanakan Prosedur: Mempercepat proses perizinan dan pelaksanaan program dengan menyederhanakan prosedur birokrasi.

## **KESIMPULAN**

Studi ini menunjukkan bahwa administrasi publik dan komunikasi publik sangat penting untuk membangun kolaborasi yang efektif antara Pokmas Mulya Abadi dan pemerintah dalam pembangunan Kelurahan. Kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan partisipatif, pengelolaan sumber daya yang transparan, dan komunikasi yang terbuka. Meskipun ada beberapa kesulitan, metode yang tepat dapat diterapkan untuk meningkatkan kerja tim. Hasilnya memungkinkan pengembangan praktik kerja sama di bidang lain dengan karakteristik serupa. Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian ini :

1. Peran Administrasi Publik: Administrasi publik kelurahan membantu dalam perencanaan dan koordinasi program pembangunan. Sebagai hasil dari wawancara dengan pejabat kelurahan, diketahui bahwa:
  - a. Perencanaan Partisipatif: Pokmas Mulya Abadi secara aktif dilibatkan oleh pemerintah kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk

menentukan kebutuhan masyarakat yang paling penting, rapat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) rutin diadakan.

- b. Pengelolaan Sumber Daya: Anggaran dan pembagian sumber daya dilakukan oleh administrasi publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat dengan pengelolaan yang jelas dan akuntabel. Pengoordinasian Program: Pemerintah Kelurahan bekerja sama dengan Pokmas untuk mengatur pelaksanaan program. Ini mencakup perizinan, pemantauan, dan penilaian proyek pembangunan.
2. Peran Komunikasi Publik Kelurahan: Komunikasi publik sangat penting untuk menyebarkan informasi dan memastikan bahwa masyarakat terlibat. Penelitian ini menemukan bahwa:
    - a. Transparansi Informasi: Untuk memberikan informasi tentang program pembangunan, pemerintah kelurahan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka, seperti papan pengumuman, media sosial, dan pertemuan rutin.
    - b. Dialog dan Konsultasi: Pemerintah dan Pokmas dapat berbicara secara langsung melalui forum diskusi dan konsultasi publik. Ini memungkinkan anggota komunitas untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka. Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah bekerja sama dengan Pokmas untuk memberi orang tahu tentang pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan melalui pelatihan dan pendidikan. Ini meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berkontribusi.
  3. Kolaborasi antara Pokmas Mulya Abadi dan Pemerintah: Kolaborasi antara Pokmas Mulya Abadi dan pemerintah kelurahan telah menunjukkan hasil yang menguntungkan. Hasil penting dari kerja sama ini meliputi:
    - a. Kesesuaian Tujuan: Semua pihak memiliki tujuan yang selaras untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini membuat lebih mudah untuk bekerja sama untuk menjalankan program.
    - b. Pembagian Tugas yang Jelas: Pemerintah Kelurahan dan Pokmas Mulya Abadi memiliki pembagian tugas yang jelas. Sementara pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan sumber daya dan pelaksanaan teknis, Pokmas berkonsentrasi pada menentukan kebutuhan masyarakat dan aspirasi.
    - c. Keberhasilan Proyek: Banyak proyek pembangunan yang berhasil diselesaikan, termasuk kegiatan fisik yaitu contohnya pemeliharaan infrastruktur jalan, pembuatan saluran, penerangan jalan, dan kegiatan nonfisik yaitu program

untuk mendorong ekonomi local melalui pelatihan. Hasil ini menunjukkan bahwa bekerja sama sangat efektif dan keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kolaborasi yang terjalin.

4. Tantangan dan Kolaborasi: Terlepas dari banyak pencapaian yang dicapai dalam kerja sama ini, ada beberapa masalah yang muncul:
  - a. Perbedaan Kepentingan: Pemerintah dan Pokmas kadang-kadang memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda, yang memerlukan perundingan lebih lanjut.
  - b. Keterbatasan Sumber Daya: Beberapa program tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan sumber daya manusia dan finansial.
  - c. Birokrasi yang Kompleks: Pelaksanaan program seringkali terhambat oleh proses birokrasi yang panjang dan kompleks.

## **SARAN**

Rekomendasi Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan, seperti:

- a. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah kelurahan harus terus meningkatkan responsivitas dan transparansi administrasi publik.
- b. Perbaikan komunikasi publik memerlukan penggunaan TIK untuk mencapai lebih banyak lapisan masyarakat.
- c. Melalui mekanisme penghargaan dan pengakuan atas kontribusi masing-masing pihak, kolaborasi antara Pokmas Mulya Abadi dan pemerintah kelurahan harus dipertahankan dan diperkuat.

Penelitian ini menghasilkan beberapa saran untuk meningkatkan kerja sama antara kelompok masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan. Rekomendasi ini dapat mencakup hal-hal seperti meningkatkan transparansi administrasi publik, meningkatkan sistem komunikasi publik, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, mereka juga dapat mencakup saran praktis tentang cara Pokmas Mulya Abadi dan pemerintah kelurahan dapat bekerja sama lebih baik untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Dengan demikian, setiap poin dari hasil penelitian diuraikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, hasil tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil dan implikasi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi publik dan komunikasi publik sangat penting untuk membangun kolaborasi yang efektif antara kelompok masyarakat

dan pemerintah dalam pembangunan kelurahan. Kolaborasi yang kuat memungkinkan pembangunan kelurahan yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif.

## REFERENSI

- Anwar, M., & Azizah, N. (2017). Sustainable development and natural resources management in urban areas: Lessons from Indonesia. *Sustainable Development and Environmental Management*, 5(2), 87–98.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory*. Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage Publications.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage Publications.
- Kusumadewi, I., & Priansa, D. (2020). Integrating urban and neighborhood planning for sustainable urban development: Lessons from case studies in Indonesia. *Journal of Urban Planning and Development*, 146(4), 04020047. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000639](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000639)
- Lailin, U. R. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi kolaboratif dalam program pemerintah daerah (Program RT Keren) di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 12(2), 1–6.
- Lembaga Demografi FEB UI. (2019). *Studi kasus pembangunan kelurahan: Tantangan dan peluang*. Jakarta.
- Nurhayati, S. (2018). Community participation in local development planning in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(2), 1–12.
- Panggabean, H. (2018). *Komunikasi pembangunan: Teori dan praktek*. PT Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga (RT) Keren.
- Peraturan Walikota Blitar No. 40 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Peraturan Walikota Blitar No. 46 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Program RT Keren.
- Prasojo, E. (2015). Public administration for sustainable development in local government: Case studies from Indonesia. *Public Administration and Policy*, 18(1), 37–50.
- Putra, A. A., & Susanto, A. B. (2019). The role of public communication in strengthening government-community collaboration: Case study of urban community development in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(1), 45–56.

- Rasyid, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. PT Elex Media Komputindo.
- Sobari, W. (2017). Komunikasi antarpublik: Teori, strategi, dan aplikasi. PT Elex Media Komputindo.
- Suryaningrat, A., Sarwono, S., & Hidayati, F. (2023). Optimalisasi kebijakan pembangunan daerah melalui program RT Keren untuk mendukung pemberdayaan masyarakat (Studi di Kota Blitar). *Administrator Jurnal Borneo*, 19(2), 145–160.
- Tjokroamidjojo, B. (2010). *Governance lokal: Konsep, teori, dan implementasi di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wulandari, R. (2020). Enhancing public participation through public communication in urban development: A case study in Indonesia. *Journal of Governance, Public Policy and Management*, 7(1), 21–32